



EDISI KAMIS, 19 FEBRUARI 2026

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengisi ceramah pada tarawih hari pertama Ramadhan 1447 H di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026). (Antara)



KPK MENANTI KLARIFIKASI MENTERI AGAMA Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Pengusaha OSO



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih menanti klarifikasi langsung dari Menteri Agama (Menag)! terkait penggunaan fasilitas jet pribadi milik pengusaha sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Lembaga antirasuah menilai penjelasan sukarela dari Nasaruddin Umar penting untuk memastikan ada atau tidaknya unsur gratifikasi dalam perjalanan tersebut. Polemik bermula saat dokumentasi perjalanan yang beredar menunjukkan Menag menggunakan jet pribadi berwarna putih dengan logo perusahaan milik Ketua Umum Partai Hanura itu. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Takalar, Sulawesi Selatan. Disebut, pada 15 Februari 2022 itu Menag menghadiri peresmian fasilitas keagamaan yang disebut sebagai Balai Sarkiah atas undangan OSO. Kemenag dalam pernyataan resmi menjelaskan penggunaan jet pribadi itu dilakukan karena keterbatasan waktu dalam agenda kerja. BACA HAL 11...

PASAL-PASAL KRUSIAL SOAL GRATIFIKASI

(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.)

1. Pasal 12B - Definisi Gratifikasi

Semua pemberian ke pejabat/ASN dianggap suap jika terkait jabatan dan bertentangan dengan tugasnya. Termasuk: uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, hotel, wisata, pengobatan gratis, hingga fasilitas transportasi seperti jet pribadi.

2. Pasal 12C - Kewajiban Lapor & Sanksi

Tidak dipidana jika gratifikasi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 30 hari kerja. Jika tidak dilaporkan dan terbukti suap: penjara 4 tahun-seumur hidup + denda sampai Rp1 miliar.

3. Pasal 5 & Pasal 12 a/b - Delik Suap

Jika ada imbalan/kesepakatan (quid pro quo), masuk kategori suap aktif/pasif. Ancaman pidana lebih berat dibanding gratifikasi biasa.

4. Aturan Teknis & Etik

- Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019: tata cara pelaporan gratifikasi.
- Kode etik instansi: larangan menerima fasilitas dari pihak berkepentingan.

ISTANA TEGASKAN TAK ADA RENCANA REVISI ULANG UU KPK

Pemerintah menyatakan belum ada rencana merevisi ulang Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap istana itu muncul menanggapi polemik setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan setuju apabila UU KPK dikembalikan ke aturan sebelumnya.

Penegasan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2026). "Belum ada, belum ada kita bahas," katanya kepada wartawan. Ia menegaskan tidak ada pembahasan internal pemerintah mengenai revisi tersebut. "Ndak ada (pembahasan), tidak ada membahas sama sekali mengenai itu," ujarnya.

Menurut dia, sekalipun terdapat dorongan dari sejumlah pihak, pemerintah belum memiliki agenda untuk mengubah regulasi yang mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saat ditanya mengenai sikap Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang setuju UU KPK dikembalikan ke versi lama, Prasetyo justru bertanya balik. "Apa hubungannya nih dengan Pak Jokowi? Enggak ada. Belum ada," imbuhan Prasetyo.



Diketahui sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan setuju apabila UU KPK dikembalikan ke aturan sebelumnya. Ia menegaskan revisi UU KPK pada 2019 merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, bukan pemerintah, dan menyebut dirinya tidak menandatangani

undang-undang tersebut meski tetap berlaku setelah 30 hari disahkan dalam rapat paripurna. "Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," ujarnya seusai menyaksikan pertandingan sepak bola di Solo.

Statmen juga datang dari lingkaran

politik. Ketua DPP PDIP Perjuangan Ronny Talapessy menyatakan Jokowi tidak mengambil tindakan apa pun ketika revisi UU KPK bergulir pada 2019, meski sejumlah tokoh nasional dan agama telah diminta memberi masukan. "Ada banyak saksi, tokoh-tokoh nasional, dan agama yang diundang diminta masukan soal UU KPK pada 2019, tetapi beliau waktu itu tidak mengambil tindakan apa-apa," ujarnya.

Ia menilai dukungan Jokowi terhadap revisi kembali UU KPK tidak berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dan mengaitkannya dengan kepentingan elektoral Partai Solidaritas Indonesia. "Saya sependapat dengan Mas Boyamin dari MAKI, bahwa Presiden Jokowi lagi cari perhatian khususnya terkait mengembalikan UU KPK yang lama. Padahal, semua masyarakat tahu bahwa UU KPK diubah pada masa kepemimpinan beliau. Dan sekarang beliau mau cuci tangan soal itu," kata Ronny.

Ia juga menyinggung stagnasi Indeks Persepsi Korupsi pada masa pemerintahan Jokowi. "Jadi, tidak ada sama sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Apalagi indeks persepsi korupsi (CPI) kita stagnan justru pada masa beliau," ujarnya.(tin,ist,kum/dya)

Sidang gugatan ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali bergulir di Pengadilan Negeri Kota Solo, Rabu (18/2/2026), dengan fokus pada pembuktian dokumen dan pendalaman alat bukti para pihak. Persidangan yang diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit ini terus menyita perhatian publik karena menyentuh isu transparansi dokumen pejabat negara.

Dalam persidangan, ahli forensik digital Rismon Sianipar menekankan bahwa keterbukaan terhadap dokumen publik, termasuk ijazah presiden, merupakan hak konstitusional warga negara. Ia menilai ruang sidang menjadi forum paling tepat untuk menguji keabsahan dokumen secara objektif agar polemik yang berkembang di masyarakat dapat diselesaikan secara tuntas.

Rismon juga mengusulkan agar majelis hakim mempertimbangkan pengujian dokumen oleh lembaga independen. Menurutnya, pelibatan lebih dari satu institusi akan memperkuat objektivitas hasil verifikasi dan meminimalkan potensi bias. Pendekatan terbuka, kata dia, merupakan langkah bijak untuk mengakhiri perdebatan publik terkait keabsahan dokumen tersebut.

Di sisi lain, pihak tergugat memilih tidak menghadirkan saksi ahli dalam persidangan. Kuasa hukum menyata-

KETEGANGAN SIDANG IJAZAH JOKOWI DI PN SOLO, SAKSI AHLI OGAH MENJAWAB

kan pembuktian melalui saksi dan dokumen tertulis dinilai telah memadai. Mereka merujuk ketentuan hukum acara yang memungkinkan hakim menentukan kebutuhan kehadiran ahli berdasarkan perkembangan pembuktian di persidangan.

Dalam perkara ini, Universitas Gadjah Mada tercatat sebagai salah satu pihak tergugat bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak tergugat juga menyampaikan bahwa dokumen ijazah asli saat ini berada dalam penggunaan penyidik untuk kepentingan proses hukum.

Permintaan penggugat agar Jokowi hadir langsung di persidangan dengan membawa ijazah asli dinilai tidak relevan dengan pokok gugatan oleh pihak tergugat. Mereka berpendapat pemeriksaan perkara harus tetap berada dalam ruang lingkup materi sengketa sebagaimana diajukan dalam gugatan.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari pihak penggugat. Majelis hakim dijadwalkan kembali mendalami alat bukti yang diajukan



guna memastikan kepastian hukum atas perkara yang masih menjadi perhatian publik tersebut.

Sementara, Pakar telematika Roy Suryo yang hadir sebagai saksi ahli menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat.

Di hadapan majelis hakim, Roy menyatakan keberatan memberikan jawaban karena sebelumnya pihak tergugat menolak kehadirannya sebagai ahli. Ia menilai tidak tepat jika pihak yang menyatakan

keberatan justru tetap mengajukan pertanyaan dalam sesi persidangan.

Ketegangan muncul saat kuasa hukum tergugat meminta klarifikasi atas pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah tersebut 99,9 persen palsu. Pihak tergugat mempertanyakan dasar kesimpulan tersebut, termasuk apakah Roy telah melakukan verifikasi langsung kepada otoritas kampus terkait adanya bagian dokumen yang dinilai janggal. (tin,ist,kum/dya)

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai evaluasi kebijakan mendesak karena proporsi kecelakaan saat mudik yang melibatkan sepeda motor tetap tinggi dari jalan dan meningkatkan biaya pemeliharaan negara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut merugikan pengguna jalan dan memperlemah keandalan jaringan logistik. Karena itu, penegakan aturan dipandang sebagai bagian dari perlindungan kepentingan publik.

"Angkutan lebaran yang hampir 50 persen kecelakaan diakibatkan dari

DPR USUL LARANGAN MOTOR MUDIK LINTAS PROVINSI

Wacana pelarangan mudik lintas provinsi menggunakan sepeda motor mengemuka dalam pembahasan keselamatan arus Lebaran 2026. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2). Komisi V DPR meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji pembatasan tersebut sebagai bagian dari upaya menekan kecelakaan tahunan yang didominasi kendaraan roda dua.



Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menggelar Program Motor Gratis (Motis) di mudik 2026 ini. (Dok.ist)

REKAYASA LALU LINTAS MUDIK & BALIK LEBARAN 2026

SISTEM ONE WAY

- Arus Mudik
17 Maret 12.00 — 20 Maret 24.00 KM 70 Tol Jakarta-Cikampek → KM 421 Tol Semarang-Solo Gerbang tol arah Jakarta ditutup
- Arus Balik
23 Maret 12.00 — 29 Maret 24.00 KM 421 Tol Semarang-Solo → KM 70 Tol Jakarta-Cikampek

CONTRA FLOW

- Arus Mudik
Tol Jakarta-Cikampek KM 47-70 17 Maret 14.00 — 20 Maret 24.00 21 Maret 12.00 — 20.00 22 Maret 09.00 — 18.00
- Arus Balik
23 Maret 14.00 — 29 Maret 24.00 Tol Jagorawi KM 21-8 Tol Jakarta-Cikampek KM 47-70 24 & 29 Maret pukul 14.00 — 19.00



PEMERINTAH menyiapkan rangkaian langkah teknis untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada arus mudik dan balik Idul Fitri 2026. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menempatkan pengendalian cuaca, kesiapan sarana transportasi, pembatasan kendaraan, serta penguatan keselamatan sebagai instrumen utama pengelolaan pergerakan publik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi menyatakan pemerintah membuka opsi operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi selama periode angkutan Lebaran.

"Kami melihat situasi cuaca, kita akan mengupayakan bila dimungkinkan melakukan operasi modifikasi cuaca. Supaya kita bisa mencegah atau mengupayakan tidak terjadi intensitas hujan yang tinggi

pengguna sepeda motor ini saya mohon dikaji ulang apakah mungkin tahun ini diterapkan untuk tidak diperbolehkan menggunakan sepeda

motor untuk mudik lebaran terutama yang lintas provinsi," ujar Huda dalam rapat tersebut.

Menurut dia, pemerintah masih

Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca

pada saat angkutan lebaran," ujar Dudy di Kompleks DPR, Rabu (18/2/2026).

Langkah tersebut dikaitkan dengan pengalaman gangguan prasarana transportasi akibat banjir, termasuk genangan yang sempat memengaruhi jalur rel di Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah memastikan pemulihan infrastruktur dilakukan bersamaan dengan langkah pencegahan.

"Ya, kalau jalur rel kemarin itu seperti yang di Pekalongan, KAI melakukan memulihkan rel," katanya.

Selain intervensi cuaca, pemerintah juga mengoordinasikan kesiapan lintas sektor transportasi serta menyiapkan program mudik gratis dan pembatasan kendaraan pada jalur tertentu guna mengurangi kepadatan arus perjalanan.

"Penyeberangan menjadi salah satu konsen kita. Di situ kita siapkan sebaik mungkin. Dari hasil evaluasi Lebaran kemarin (2025), kemudian juga Nataru, kita melakukan perbaikan layanan nanti di penyeberangan," ujar Dudy.

Ia menambahkan, pemeriksaan

kelaikan kendaraan atau ramp check terus dilakukan untuk memastikan seluruh armada yang beroperasi dalam kondisi aman.

"Persiapan lebaran kita sudah koordinasi stakeholder, kemudian persiapan ramp check dan sebagainya untuk kelaikan," tuturnya.

Berdasarkan survei angkutan Lebaran, Kemenhub memproyeksikan 143,9 juta orang melakukan perjalanan mudik pada 2026. Angka tersebut lebih rendah 1,7 persen dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya, meskipun realisasi mobilitas pada periode lalu tercatat lebih tinggi dari estimasi.

"Jadi walaupun Bapak dan Ibu melihat ada sedikit penurunan sebesar 1,7%, namun ini tidak mengurangi kewaspadaan kami dalam rangka persiapan karena melihat tahun kemarin yang naik signifikan," ujar Dudy dalam pernyataan resmi.

Proyeksi tersebut berbeda dari estimasi Korps Lalu Lintas Polri yang memperkirakan jumlah pemudik mencapai sekitar 146 juta orang.(wid,ist,kum/dya)

memiliki waktu sebelum puncak arus mudik untuk merumuskan kebijakan berbasis mitigasi risiko. Pembatasan, kata Huda, tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti penyiapan moda alternatif bagi masyarakat.

"Kelihatannya, Pak Menteri ini bisa dikoordinasikan dengan lintas kementerian, lintas sektor, supaya kebutuhan masyarakat yang tadinya menggunakan sepeda motor ini bisa dikonversi untuk difasilitasi pemerintah melalui angkutan lebaran yang lebih aman," katanya.

Dorongan pembatasan perjalanan berisiko tinggi itu berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan terhadap angkutan umum. Anggota Komisi V DPR Daniel Mutaqien Syaifudin menyoroti kesiapan armada bus menjelang puncak mobilitas Lebaran, terutama terkait konsistensi pemeriksaan teknis kendaraan.

"Akhir Desember lalu kan ada kecelakaan di Semarang bus, ini kan pasti volume penggunaan bus jelang mudik lebaran itu pasti akan banyak," ujar Daniel dalam rapat yang sama.

Ia mempertanyakan efektivitas prosedur ramp check setelah ditemukan kendaraan yang telah dinyatakan tidak layak jalan tetapi beroperasi hingga memicu kecelakaan.

"Hasil dari ramp check tersebut bus tidak layak digunakan, tapi dua minggu kemudian bus itu digunakan dan terjadi kecelakaan," ujarnya.

Daniel juga menyindir perbedaan respons keselamatan transportasi di dalam negeri dan di negara lain. "Di Eropa ya kalau gak salah delapan orang meninggal kecelakaan kereta, 8 orang meninggal jadi hari berkabung nasional, pasang bendera setengah tiang. Kemarin kecelakaan bus hampir 16 orang dan kita anggap biasa aja padahal kita bisa belajar banyak di wilayah itu," katanya.

Seiring menguatnya wacana pelarangan motor lintas provinsi, pemerintah menyiapkan skema substitusi moda melalui program mudik gratis 2026. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menyiapkan 401 bus untuk 15.834 penumpang serta layanan Mudik Motor Gratis (Motis) menggunakan kereta api. (wid,ist,kum/dya)

PENANGANAN PASCABENCANA SUMATERA

MASIH TERSENDAT-SENDAT

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus berjalan, namun masih tersebat-sendat. Hambatan pendataan, sinkronisasi anggaran, serta percepatan pembangunan hunian tetap menjadi simpul masalah yang belum sepenuhnya terurai dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026) sejumlah menteri memaparkan progres sekaligus kendala yang menunjukkan fase pemulihannya masih bergerak tersendat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan kerusakan lahan sawah akibat bencana di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera mencapai sekitar 94.000 hektare. Untuk mempercepat pemulihannya, Kementerian Pertanian telah menyusun rencana kegiatan lengkap dengan kebutuhan pendanaan dan menyerahkannya kepada Bappenas serta Kementerian Keuangan.

"Kami sudah sampaikan ke Bappenas dan juga Menteri Keuangan. Anggaran reguler kami, kami gunakan 1,49 triliun [untuk] 2025. [Untuk] 2026 kami geser," kata Amran dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menambahkan kebutuhan tambahan anggaran masih cukup besar. "Kemudian masih butuh tambahan 2026 [sebesar] 2,1 triliun, 2027 [sebesar] 1,1 triliun. Total 4,7 triliun. Tetapi kami sudah geser anggaran, 1,4 triliun anggaran reguler dari Kementerian Pertanian," ujarnya.

Pemerintah telah menyalurkan bantuan dan merehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah titik terdampak. Dari total lahan rusak, sekitar 39.000 hektare telah memasuki tahap penanaman ulang. "Kita sudah rehab irigasi, kemudian langsung tanam. Hari ini kita sudah kirim dan penanaman kurang lebih 39.000 hektare," kata Amran.

Skala dampak bencana yang luas turut tercermin dari data korban. Pemerintah mencatat 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang masih hilang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut jumlah pengungsi telah menurun signifikan, meski ribuan warga masih bertahan di pengungsian.

"Pengungsi yang tadinya 2 juta orang lebih, sekarang menjadi lebih kurang 12.954 yang ada di tenda," ujar Tito dalam rapat yang sama. Ia merinci, pengungsi di Aceh menjadi yang terbanyak, yakni 12.144 orang, sementara di Sumatera Utara terdapat 890 orang yang berada di Tapanuli Tengah, dan di Sumatera Barat sudah tidak ada lagi pengungsi di tenda.

Bencana tersebut berdampak pada 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa, termasuk kerusakan



Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang, Aceh, bersolek menyambut Ramadan 1447 H pada Rabu (18/2/2026). (ant)

rumah dengan kategori ringan, sedang, berat, hingga hilang.

Permasalahan hunian menjadi titik krusial dalam proses rekonstruksi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai pemerintah masih berkutat pada

persoalan pendataan dan spesifikasi rumah bagi korban bencana.

"Harapan saya soal data ini dikasih deadline saja, Pak. Kalau enggak, enggak ada ujungnya. Rapat terus sudah 3 bulan, enggak ada ujungnya. Datanya dikasih deadline supaya

selesai, kemudian baru kemudian diputuskan kita mana yang dibangun," kata Maruarar.

Pemerintah telah membagi tugas pembangunan rumah antara kementerian dan BNPB. BNPB membangun rumah secara mandiri satu per satu, sementara Kementerian PKP membangun dalam satuan kawasan besar sekitar 100–200 unit. Namun Maruarar menekankan keseragaman harga dan spesifikasi rumah agar tidak memicu kecemburuhan sosial.

"Karena ini soal sensitif soal bantuan, Pak Ketua. Yang kami bangun maupun yang BNPB bangun, saran kami sebaiknya harganya dan speknya sama. Sehingga kita menjaga perasaan-perasaan tidak enak dari satu sama lain," ujarnya.

Hingga kini komitmen pembangunan rumah dari pemerintah dan sektor swasta mencapai 2.603 unit. Ia berharap sebelum Lebaran sudah ada ratusan rumah yang dapat dihuni. "Jadi bayangkan, kita sudah [selesai pembangunannya] sebelum Lebaran mudah-mudahan sudah ratusan yang bisa dihuni," katanya.

Data pemerintah menunjukkan pembangunan hunian sementara telah mencapai 28.236 unit atau sekitar 74 persen dari total rumah rusak berat di Aceh, sementara 9.996 unit lainnya memperoleh bantuan Dana Tunggu Hunian. Secara keseluruhan, tercatat 38.169 unit rumah rusak berat di wilayah tersebut..(gu,ant,ist/dya)

Kemendikdasmen Ajukan Tambahan Rp 2,4 T

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengusulkan anggaran biaya tambahan (ABT) sebesar Rp 2,4 triliun guna mendukung pemulihannya sektor pendidikan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kami usulkan Pak Pimpinan (Sufmi Dasco) Rp 2,4 triliun," kata Mu'ti dalam rapat Satuan Tugas Pemulihaan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam Sumatera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan sebenarnya telah lebih dulu digelontorkan, terutama bagi tenaga pendidik yang terdampak bencana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan Rp 220,5 miliar untuk 36.074 guru dan tenaga kependidikan, masing-masing menerima Rp 2 juta per bulan selama tiga bulan.

Selain itu, tunjangan guru di wilayah terdampak tetap dibayarkan tanpa syarat beban mengajar dengan total anggaran Rp 508,9 miliar. Bantuan operasional pendidikan juga telah disalurkan ke 29.000 satuan pendidikan di kabupaten



DPR dan Pemerintah menggelar rapat Satgas Galapana pemuliharaan pasca bencana Aceh dan Sumatera, Rabu (18/2/2026). (Ist)

terdampak dengan nilai Rp 1,98 triliun.

"Bantuan operasional satuan pendidikan sudah tersalur ke 29.000 satuan pendidikan di kabupaten terdampak dengan nilai Rp 1,98 triliun," ujar Mu'ti.

Meski proses belajar mengajar telah berjalan penuh, kondisi di lapangan belum sepenuhnya normal. Sejumlah sekolah masih menjalankan kegiatan belajar di fasilitas sementara.

"Kami sampaikan secara umum bahwa kegiatan pembelajaran di tiga provinsi terdampak bencana sudah berlangsung 100 persen, hanya saja memang pembelajaran belum

berlangsung secara ideal," katanya. "Sebagian masih belajar di tenda atau di kelas darurat, dan sebagian menumpang di sekolah lain," lanjutnya.

Data Kemendikdasmen menunjukkan sekolah yang telah kembali menggelar pembelajaran di gedung masing-masing mencapai 3.001 sekolah di Aceh, 626 sekolah di Sumatera Barat, dan 1.104 sekolah di Sumatera Utara.

Usulan tambahan anggaran tersebut diajukan untuk mempercepat pemuliharaan sarana pendidikan serta memastikan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dalam kondisi layak di wilayah terdampak bencana.(wid,rla/dya)

LEDAKAN MAUT TEMPAT PRODUksi PETASAN DI SITUBONDO: 1 TEWAS, 7 TERLUKA

Ledakan hebat mengguncang sebuah rumah warga di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Rabu (18/2/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Rumah permanen milik Kulsum (60) yang diduga digunakan sebagai lokasi penyimpanan sekaligus produksi petasan ambruk rata dengan tanah. Insiden itu menewaskan satu orang dan melukai tujuh lainnya. Korban selamat sebagian mengalami luka bakar serius serta patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan.

Kepala Polres Situbondo, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie menyatakan ledakan terjadi pada siang hari berdasarkan keterangan saksi di sekitar lokasi. "Sesuai keterangan saksi warga sekitar lokasi kejadian, ledakan terjadi sekitar pukul 12.00 WIB," kata Bayu di lokasi kejadian.

Bangunan yang menjadi sumber ledakan diketahui milik Kulsum dan berada di kawasan permukiman padat. Daya ledaknya merusak rumah tersebut hingga rata dengan tanah dan menyebabkan sejumlah rumah warga di sekitarnya turut terdampak. Polisi menduga sumber ledakan berasal dari serbuk atau bahan pembuat petasan yang disimpan di dalam rumah.

Korban meninggal dunia adalah Supriyadi (50), yang tertimpa



Garis polisi terpasang di lokasi kejadian ledakan petasan di Dusun Mimbo Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur. Rabu (18/2/2026). (Antara)

dilarikan ke RSUD Asebagus untuk mendapatkan perawatan medis. Satu korban lainnya, Abdurrahman (15), dirujuk ke RSUD dr. Abdoer Rahem karena mengalami luka bakar serius.

Pemkab Beri Bantuan Rumah Rusak



Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah saat memantau langsung korban ledakan petasan di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih. Rabu (18/2/2026). ist

PEMERINTAH Kabupaten Situbondo menyatakan akan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak akibat ledakan petasan di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Rabu (18/2/2026) siang. Ledakan yang terjadi di rumah milik Kulsum (60) itu menewaskan satu orang, melukai tujuh lainnya, serta merusak belasan rumah di sekitar lokasi.

Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial setempat untuk menaksir kerusakan dan menyiapkan bantuan

bagi warga terdampak.

"Informasi yang kami terima ada tujuh rumah terdampak ledakan petasan, tapi setelah kami cek langsung, ternyata ada 12 rumah yang rusak akibat ledakan petasan siang tadi," ujar Ulfiyah saat berada di lokasi kejadian.

Ia menegaskan bantuan akan diberikan sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah. Ulfiyah juga mengimbau masyarakat tidak menjadikan petasan sebagai tradisi, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

"Petasan itu sesuatu yang berbahaya, jadi jangan dijadikan

tradisi ya. Mari kita sambut Ramadhan dan Idul Fitri dengan hal-hal yang baik, agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang," ujarnya.

Ledakan terjadi sekitar pukul 12.00-12.17 WIB di rumah Kulsum yang diduga menjadi lokasi penyimpanan dan perakitan bahan petasan. Bangunan rumah ambruk rata dengan tanah dan menimbulkan dampak kerusakan pada rumah-rumah di sekitarnya. Peristiwa itu menimbulkan korban jiwa atas nama Supriyadi (50) yang meninggal dunia setelah tertimpa reruntuhan bangunan.

Kepala Polres Situbondo, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie, memastikan ledakan berasal dari petasan. Polisi menemukan sejumlah selongsong kertas petasan berdiameter sekitar empat sentimeter dengan panjang sekitar 14 sentimeter di lokasi kejadian.

"Bahan peledak ilegal ini tidak bisa kita pantau penggunaannya. Misal digunakan untuk membuat petasan, sehingga terjadi ledakan dan memakan korban," ucap Bayu.

Ia menambahkan polisi belum dapat melakukan olah tempat kejadian perkara karena masih terdapat sisa bahan peledak di bawah reruntuhan. Aparat menunggu proses sterilisasi oleh tim penjinak bom.

BEBERAPA PERISTIWA LEDAKAN PETASAN YANG SIGNIFIKAN DI INDONESIA

○ **Situbondo, Jawa Timur (Februari 2026):** Sebuah ledakan dahsyat di Dusun Mimbo menghancurkan sejumlah rumah. Insiden ini mengakibatkan 1 orang tewas tertimbun reruntuhan dan 7 orang luka parah.

○ **Grobogan, Jawa Tengah (Februari 2026):** Tiga remaja menjadi korban ledakan saat sedang meracik bahan mercon.

○ **Blitar, Jawa Timur (April 2025):** Ledakan petasan rakitan menghancurkan satu rumah dan melukai 4 remaja di Dusun Kakahrejo. Para korban mengalami luka bakar serius, bahkan salah satunya kehilangan jari tangan.

○ **Pamekasan, Jawa Timur (Maret/April 2025):** Terjadi "pesta petasan maut" saat Idulfitri 1446 H yang menewaskan seorang remaja. Di lokasi lain di Pamekasan, sebuah festival kembang api berubah menjadi tragedi ketika petasan kembang api roboh, mengakibatkan 1 orang tewas.

○ **Tulungagung, Jawa Timur (April 2025):** Petasan berukuran besar jatuh dari balon udara meledak dan menghancurkan teras serta kaca rumah warga, serta merusak mobil pemudik. Polisi menetapkan 7 tersangka terkait insiden penerbangan balon udara ini.

○ **Blitar, Jawa Timur (Februari 2023):** Ledakan bubuk mercon di Desa Karangbendo menghancurkan total satu rumah dan merusak 25 rumah di sekitarnya. Peristiwa ini menewaskan 4 orang dan melukai 6 orang lainnya.

○ **Kebumen, Jawa Tengah (Mei 2021):** Ledakan terjadi saat sejumlah pemuda meracik petasan untuk malam takbiran di Desa Ngabean. Insiden ini mengakibatkan 4 orang tewas dan 4 orang luka-luka.



"Untuk korban Abdurrahman dirujuk ke RSUD dr. Abdoer Rahem karena luka bakarnya sekitar 90 persen," ujar Bayu.

Polisi memasang garis pengaman di sekitar lokasi ledakan. Aparat juga meminta bantuan Tim Gegana Satbrimob Polda Jatim untuk mensterilkan area sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Bayu mengatakan, polisi belum dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh karena dikhawatirkan masih terdapat bahan petasan di bawah reruntuhan.

"Kami belum bisa melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP karena tidak memiliki kemampuan dan meminta bantuan Tim Gegana Polda Jatim," kata Bayu.

Menurutnya, personel kepolisian sementara mengamankan lokasi sambil menunggu proses sterilisasi. "Setelah tim penjinak bom dari Satbrimob Polda Jatim datang dan sterilisasi di lokasi kejadian, baru kami dari Polres Situbondo akan melakukan olah TKP," kata Kapolres Bayu.

Tanpa Industri Baru, Pemkab Malang Akui Sulit Kejar Target Investasi Rp4,74 T

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menargetkan nilai investasi sebesar Rp4,74 triliun pada 2026. Namun, diakui target tersebut akan sulit diraih apabila tidak ada penambahan industri atau pembangunan pabrik baru di wilayahnya.

Analis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang, Endah Dwi Suhesti, menjelaskan besaran target tersebut sama dengan angka realisasi di tahun 2025.

"Tetapi kami akan sulit mencapai target jika tidak ada penambahan pabrik baru. Karena pembangunan baru itu ada pembelian tanah yang nilainya cukup besar," ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Endah menyebut, investasi tahun sebelumnya masih didominasi sektor-sektor tertentu. Lima sektor utama meliputi industri makanan, perumahan, serta kawasan industri dan perkantoran.

"Seperti pabrik rokok atau industri pengolahan tembakau itu juga banyak.

Investasi mereka biasanya dilaporkan jika membeli mesin," katanya.

Menurut Endah, lonjakan nilai investasi umumnya terjadi ketika ada pembangunan gedung usaha baru. Salah satu contohnya adalah pembangunan rumah sakit pada tahun 2025 lalu yang turut mendongkrak nilai investasi daerah.

Sementara itu, pembelian mesin diakuinya memang masuk dalam laporan investasi. Namun, nilai yang dihasilkan tersebut tidak selalu sebesar harga mesin baru. Karena biasanya dikurangi nilai mesin lama yang sudah tidak produktif.

"Kecuali mesin lama masih berfungsi dengan baik dan mesin baru benar-benar menambah produktivitas. Kalau tidak, nilainya dihitung setelah dikurangi mesin lama," jelasnya.

Karena itu, menurut Endah pembangunan fasilitas baru seperti pabrik atau gedung usaha dinilai lebih signifikan dalam mendongkrak capaian investasi. Pasalnya, terdapat komponen pembelian lahan dan pembangunan fisik di dalamnya, yang

berdampak besar terhadap total investasi.

Untuk mengejar target tersebut, Pemkab Malang berupaya mempermudah proses perizinan usaha. Di antaranya melalui percepatan penerbitan Persewuuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai syarat pendirian bangunan.

Selain perizinan, DPMPTSP juga memerlukan pendampingan kepada pelaku usaha yang hendak mengembangkan bisnisnya. Pendampingan itu, kata Endah, termasuk memastikan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan tata ruang.

"Contoh jika ada pengusaha yang



Ilustrasi: Pekerja salah satu pabrik perusahaan asal Jerman di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. (Santi/Lentera)

mau membangun pabrik, kami akan tunjukkan lokasi yang masih bisa dimanfaatkan sesuai zonasi tata ruangnya. Jangan sampai membangun pabrik di lahan yang berwarna hijau," terangnya.(Santi/Dya)

Terbentur Anggaran, Pemkot Malang Tak Perluaa Wi-Fi Gratis



Ilustrasi: Banyak warga memanfaatkan Alun-alun Merdeka Kota Malang sebagai salah satu ruang publik. (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengakui belum dapat memperluas cakupan Wi-Fi di sejumlah ruang publik pada tahun 2026. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama belum adanya penambahan titik maupun peningkatan kapasitas bandwidth layanan internet gratis tersebut.

"Kalau keinginan kami memang

ada. Tetapi semuanya harus memperhatikan proporsi yang ada, artinya ketersediaan anggaran yang ada," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatica (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, Rabu (18/2/2026).

Ditegaskannya, ruang-ruang publik tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan layanan yang bisa

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, intervensi terhadap ruang publik bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga layanan pendukung seperti akses internet.

"Ruang-ruang publik itu menjadi hal yang penting untuk diintervensi, baik itu berkaitan dengan layanan atau

hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," jelasnya.

Meski demikian, untuk tahun anggaran 2026, Diskominfo memastikan belum ada penambahan layanan Wi-Fi gratis berdasarkan titik existing yang sudah ada. "Ke depan mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau untuk di tahun 2026 ini belum ada," tegasnya.

Pria yang akrab dengan sapaan Wiwid tersebut menegaskan, saat ini layanan Wi-Fi gratis di Kota Malang masih tersedia secara terbatas di sejumlah taman kota dan ruang publik. Namun kapasitasnya dinilai belum besar dan belum mengalami peningkatan bandwidth.

"Skalanya memang terbatas. Taman-taman kota memang kami intervensi tapi kapasitasnya tidak besar. Tetapi sekali lagi untuk penambahan bandwidth di tahun 2026 ini belum ada. Mungkin tahun 2027 bisa menjadi pertimbangan," imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah pengunjung Alun-alun Merdeka berharap fasilitas Wi-Fi gratis dapat diperluas, terlebih setelah kawasan

tersebut direvitalisasi dan kini lebih tertenjang. Salah satu pengunjung, Rara (24), warga Lowokwaru, mengaku akses internet gratis akan sangat membantu, terutama bagi pelajar dan mahasiswa yang memanfaatkan ruang publik.

"Sekarang alun-alunnya sudah bagus dan nyaman. Kalau ada Wi-Fi yang lebih stabil tentu akan lebih mendukung," ujarnya.

Di sisi lain, Wiwid mengatakan, pihaknya saat ini tengah memfokuskan program pada penguatan edukasi digital, khususnya pasca revitalisasi Alun-alun Merdeka. Ruang publik tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga ruang yang menghidupkan kembali memori kolektif warga.

Menurutnya, pasca revitalisasi, alun-alun diharapkan menjadi ruang yang membuat masyarakat "menolak lupa" terhadap sejarah dan identitas Kota Malang. Selain itu, kawasan tersebut juga akan terintegrasi dengan Kayutangan Heritage sebagai bagian dari penataan satu kesatuan kawasan wisata.(Santi/Dya)

GENJATAN SENJATA DI UJUNG TANDUK, PM KAMBOJA TUDUH THAILAND DUDUKI WILAYAHNYA

Ketegangan di perbatasan Kamboja dan Thailand kembali mengemuka ketika implementasi gencatan senjata yang disepakati tahun lalu mulai di ujung tanduk. Pemerintah di Phnom Penh menilai situasi di lapangan belum berubah secara substansial, sementara Bangkok bersikukuh bahwa penempatan pasukan mereka bertujuan menjaga stabilitas pascakonflik. Perbedaan persepsi itu membuat ruang de-escalasi kian menyempit. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menyampaikan tuduhan langsung bahwa militer Thailand masih berada jauh di dalam wilayah yang diklaim sebagai kedaulatan negaranya.

Dalam wawancara dengan Reuters, ia menegaskan keberadaan pasukan tersebut bukan sekadar posisi defensif di garis perbatasan, melainkan telah melampaui batas yang menurut Phnom Penh seharusnya menjadi garis pemisah kedua negara.

"Pasukan Thailand masih menduduki wilayah Kamboja jauh di dalam banyak daerah. Ini bahkan lebih jauh dari klaim sepihak Thailand sendiri di garis perbatasan," ujar Hun Manet dikutip Rabu (18/2/2026).

Ia menambahkan bahwa pemasangan kontainer pengiriman dan kawat berduri di sejumlah titik telah membatasi mobilitas warga sipil. "Ini bukan sebuah tuduhan, tetapi pernyataan berdasarkan fakta yang ada di lapangan."

Menurut pemerintah Kamboja, dampak militerisasi wilayah sengketa tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga nyata bagi kehidupan masyarakat



Tentara Kamboja berjaga di kawasan perbatasan Prey Chan, Banteay Meanchey, Kamboja, 29 Agustus 2025. (Dok.Ant)

setempat. Sejumlah warga disebut belum dapat kembali ke rumah mereka karena area yang sebelumnya dihuni kini berada di zona yang dipersengketakan. Phnom Penh memandang kondisi itu sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah sekaligus ancaman terhadap stabilitas sosial di kawasan perbatasan.

Pernyataan Hun Manet

disampaikan di sela kunjungannya ke Washington DC untuk menghadiri forum Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Badan internasional tersebut dibentuk pada Januari 2026 dan awalnya difokuskan pada konflik di Timur Tengah, sebelum kemudian memperluas mandatnya ke sejumlah sengketa global, termasuk ketegangan di Asia

Tenggara.

"Kami percaya Dewan Perdamaian merupakan pelengkap yang berharga bagi mekanisme yang ada di organisasi internasional untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, serta membangun dan memastikan perdamaian di banyak wilayah yang terdampak perang," kata Hun Manet.

Ia menyebut keterlibatan forum internasional diperlukan untuk mendorong stabilitas yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga operasional di lapangan.

Konflik bersenjata di perbatasan kedua negara meletus pada Juli 2025 setelah serangkaian insiden militer yang memicu baku tembak di beberapa titik strategis. Bentrokan tersebut menimbulkan korban jiwa dari kedua pihak serta memaksa ratusan ribu warga sipil meninggalkan rumah mereka. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi lintas batas pun tidak terhindarkan, terutama pada jalur perdagangan yang selama ini menjadi penghubung penting kawasan.

Upaya meredakan konflik sempat ditempuh melalui kesepakatan damai yang ditandatangi di Kuala Lumpur pada Oktober 2025 dengan dukungan mekanisme kawasan di bawah ASEAN. Namun kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya menghentikan ketegangan. Kedua negara kemudian saling menuduh melanggar komitmen, sementara insiden sporadis terus dilaporkan terjadi di wilayah sengketa.(rtr,ist,gus/dya)

SELAT HORMUZ DITUTUP SEBAGIAN: IRAN, RUSIA DAN CHINA GELAR LATIHAN PERANG



Iran menggelar latihan militer di Selat Hormuz sebagai tanda kekuatan menjelang perundingan nukir dengan Amerika Serikat di Jenewa, Swiss pada Selasa (17/2/2026). (Dok.IRGC)

PEMERINTAH Iran menutup sebagian jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah latihan militer gabungan yang melibatkan Rusia dan China. Langkah tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya konsentrasi kekuatan militer di kawasan Teluk dan mempertegas dinamika rivalitas geopolitik di jalur energi paling vital di dunia.

Penutupan parsial selat dilakukan dengan alasan keselamatan navigasi seiring latihan militer yang digelar pasukan Korps Garda Revolusi Iran. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa sebagian jalur pelayaran

internasional akan ditutup sementara "demi menghormati prinsip-prinsip keselamatan dan navigasi".

Otoritas setempat tidak merinci durasi total latihan, namun penutupan diperkirakan berlangsung selama beberapa jam.

Latihan tersebut merupakan bagian dari rangkaian manuver angkatan laut gabungan bertajuk "Maritime Security Belt-2026" yang melibatkan unit angkatan laut Iran, Rusia, dan China di perairan strategis tersebut serta Samudra Hindia bagian utara. Kegiatan bersama mencakup operasi anti-pembajakan, penanggulangan terorisme maritim, dan misi pencarian serta penyelamatan. Latihan serupa telah digelar sejak 2019 atas inisiatif Iran, dengan tujuan memperkuat keamanan perdagangan maritim di

kawasan yang menjadi jalur utama distribusi energi global.

Ajudan presiden Rusia, Nikolai Patrushev, menyatakan penggerahan kapal perang dalam latihan tersebut berkaitan dengan upaya Moskow mendorong terbentuknya keseimbangan kekuatan global di laut. Dalam wawancara dengan majalah mingguan Argumenty i Fakty, ia mengatakan Rusia berupaya membangun "tatanan dunia multipolar di lautan" sebagai tanggapan terhadap apa yang disebutnya sebagai hegemoni Barat.

Ia menambahkan bahwa potensi kerja sama maritim di dalam kerangka BRICS perlu diperluas menjadi dimensi strategis yang lebih nyata.

Menurut Patrushev, latihan "Maritime Security Belt-2026" menunjukkan relevansi koordinasi angkatan laut untuk melindungi jalur perdagangan yang dinilai semakin rentan.

Ia juga merujuk pada latihan maritim sebelumnya yang melibatkan sejumlah negara anggota BRICS dan mitra pada awal tahun ini di Atlantik Selatan.(rtr,ist,dya)

Duduk Bersila Pascaolahraga Picu Varises, Fakta atau Mitos?

Kebiasaan menekuk kaki atau duduk bersila sesaat setelah melakukan aktivitas fisik berat sering kali dianggap sebagai pemicu utama munculnya varises. Namun, benarkah tindakan tersebut secara medis terbukti membahayakan pembuluh darah?

Penjelasan Pakar Spesialis Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular, dr. Ankri Hakam, Sp.BTKV, FIATCVS, menegaskan, anggapan mengenai duduk bersila dapat menyebabkan varises adalah sebuah mitos. Menurutnya, fenomena varises tidak muncul secara instan hanya karena posisi kaki tertentu setelah berolahraga.

"Ini adalah mitos yang sering kali tersebar di masyarakat. Sebenarnya, varises merupakan gangguan pada pembuluh darah vena yang mengalami pelebaran atau pembengkakan akibat melemahnya katup vena, bukan semata-mata karena posisi duduk setelah olahraga," ujar dr. Ankri.

mekanisme terjadinya varises berkaitan dengan struktur pembuluh darah vena pada manusia yang bersifat elastis dan mampu

menyesuaikan diri dengan kontur serta posisi tubuh. Ketika seseorang duduk bersila, aliran darah dari tungkai ke arah jantung memang dapat mengalami sedikit perlambatan akibat posisi kaki yang tertekuk.

Namun, selama katup vena masih berfungsi dengan baik dan dinding pembuluh darah tetap elastis, darah akan tetap dapat mengalir kembali menuju jantung tanpa menimbulkan hambatan permanen atau kerusakan pada pembuluh darah.

Risiko munculnya varises justru lebih tinggi pada individu dengan gaya hidup kurang aktif atau jarang bergerak (gaya hidup sedenter), karena sirkulasi darah pada tungkai tidak terstimulasi secara optimal.

Selain itu, faktor genetik juga berperan besar dalam menentukan kerentanan seseorang terhadap varises, termasuk kekuatan dinding pembuluh darah dan fungsi katup vena.

Orang dengan riwayat keluarga varises umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi meskipun tidak sering duduk bersila.

Olahraga dengan intensitas tinggi seperti lari atau angkat beban memang memberikan tekanan sementara pada

otot dan pembuluh darah di area kaki. Meski demikian, varises pada umumnya terbentuk akibat akumulasi tekanan dalam jangka panjang yang terjadi secara berulang dan berlangsung lama, bukan semata-mata karena posisi kaki yang ditekuk atau bersila selama beberapa menit setelah berolahraga.

Tekanan kronis inilah yang dapat melemahkan katup vena dan membuat darah cenderung berkumpul di pembuluh darah bagian bawah.

Walaupun duduk bersila tidak terbukti secara langsung menyebabkan varises, para ahli tetap menyarankan untuk meluruskan kaki setelah berolahraga atau setelah duduk dalam

waktu lama. Anjuran ini bertujuan membantu mempercepat proses pemulihan otot, mengurangi rasa pegal, serta memastikan sirkulasi darah kembali berjalan optimal ke seluruh tubuh tanpa adanya hambatan mekanis.

Dengan kebiasaan sederhana ini, aliran darah dari tungkai ke jantung dapat tetap terjaga dengan baik dan risiko gangguan sirkulasi dapat diminimalkan. Selain meluruskan kaki, menggerakkan pergelangan kaki atau berdiri sejenak setelah duduk lama dapat membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi tekanan pada pembuluh vena di tungkai. (Nathasya_Mahasiswa UIUNSA, Berkontribusi dalam tulisan ini)

Tips Mencegah Varises dan Menjaga Kesehatan Vena

Agar sirkulasi darah tetap lancar dan risiko varises dapat diminimalisasi, berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat Anda lakukan:

Lakukan Pendinginan (Cooling Down)

Jangan langsung berhenti total setelah olahraga intens. Lakukan jalan santai selama 5-10 menit untuk membantu memompa darah dari kaki kembali ke jantung secara bertahap.

Posisi Kaki Lebih Tinggi

Saat beristirahat setelah berolahraga atau sebelum tidur, sangga kaki dengan bantal agar posisinya lebih tinggi dari jantung. Posisi ini membantu kerja gravitasi dalam melancarkan aliran darah vena kembali ke jantung, sehingga dapat mengurangi rasa pegal, Bengkak, dan ketegangan pada kaki setelah beraktivitas.

Hindari Berdiri atau Duduk Terlalu Lama

Jika pekerjaan Anda mengharuskan posisi statis dalam waktu lama, usahakan untuk melakukannya

peregangan kecil atau berjalan setiap 30 menit guna mengaktifkan otot betis (yang berfungsi sebagai "jantung kedua").

Gunakan Kaus Khaki Kompres

Jika diperlukan bagi Anda yang sering melakukan olahraga lari jarak jauh atau angkat beban berat, penggunaan kaus kaki kompres dapat membantu menjaga tekanan pada pembuluh darah agar tetap stabil.

Jaga Berat Badan Ideal

Tekanan berlebih akibat obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama yang memperlambat aliran pembuluh vena pada khaki.

Hidrasi yang Cukup Cairan

yang cukup menjaga viskositas (kekentalan) darah tetap normal, sehingga aliran darah di dalam pembuluh vena tetap lancar. (*)



Peneliti Kembangkan Aplikasi AI untuk Identifikasi Jejak Kaki Dinosaurus



Jejak kaki yang tercetak di lumpur jutaan tahun lalu sering kali menjadi satu-satunya petunjuk tentang siapa yang melintas di bumi purba.

Namun selama ini para ilmuwan menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi dinosaurus mana yang meninggalkan jejak tersebut, karena bentuk jejak yang berubah karena kondisi tanah dan proses fosilisasi tidak selalu mencerminkan anatominya aslinya.

Namun, menafsirkan jejak tersebut bukan perkara mudah. Sebuah aplikasi baru yang ditenagai kecerdasan buatan AI kini berpotensi membantu ilmuwan untuk mengidentifikasi jejak kaki dinosaurus.

Para ahli paleontologi menghadapi tantangan besar ketika mencoba mencocokkan jejak kaki fosil dengan spesies dinosaurus tertentu, karena bentuk jejak dapat dipengaruhi oleh kondisi tanah saat jejak dibuat.

Selama puluhan tahun, para paleontologi memperdebatkan apakah jejak-jejak purba itu ditinggalkan oleh dinosaurus pemangsa yang ganas, pemakan tumbuhan yang relatif jinak, atau bahkan spesies awal burung.

Penelitian yang dipimpin oleh pusat riset Helmholtz Zentrum di Berlin, bekerja sama dengan University of Edinburgh, menggunakan algoritma canggih yang memungkinkan komputer melatih dirinya sendiri untuk mengenali variasi bentuk jejak kaki dinosaurus. Dilansir dari Eurekalert, model AI ini dilatih menggunakan hampir 2.000 jejak fosil, ditambah jutaan variasi tambahan untuk meniru perubahan realistik, seperti tekanan dan pergeseran tepi jejak.

Kini peneliti dan penggemar

dinosaurus dapat mengunggah foto atau sketsa jejak kaki dari ponsel untuk bisa ke aplikasi dino tracker untuk memperoleh analisis instan.

Kajian mengenai pemanfaatan aplikasi kecerdasan buatan ini dipublikasikan dalam sebuah studi berjudul "Identifying variation in dinosaur footprints and classing problematic specimens via unbiased unsupervised machine learning" yang terbit di jurnal PNAS. Melalui penelitian tersebut, para peneliti menunjukkan bahwa sistem AI yang dikembangkan mampu mengelompokkan dan mengklasifikasikan jejak kaki dinosaurus dengan tingkat kecocokan yang hampir setara dengan hasil analisis para ahli manusia, yakni mencapai sekitar 90 persen. Hasil ini

menandakan bahwa teknologi pembelajaran mesin memiliki potensi besar untuk membantu proses identifikasi fosil jejak kaki yang selama ini membutuhkan ketelitian dan pengalaman tinggi dari para paleontolog.

Berbeda dengan metode tradisional yang selama ini digunakan, pendekatan konvensional mengharuskan peneliti menyusun dan memberi label kumpulan data komputer secara manual, di mana jejak tertentu dipasangkan dengan jenis dinosaurus tertentu berdasarkan penilaian para ahli. Proses ini tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga berpotensi menimbulkan bias subjektif karena sangat bergantung pada interpretasi manusia. Dengan penerapan metode pembelajaran mesin tanpa pengawasan (unsupervised), sistem AI dapat mengenali pola secara mandiri dari data yang tersedia, sehingga diharapkan mampu menghasilkan klasifikasi yang lebih objektif. (Ilma - Mahasiswa UINSA, Berkontribusi dalam tulisan ini)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | MOJOKERTO: NUR HIDAYAH | LAMONGAN: L HANDI | BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA | KEDIRI: GATOT SUNARKO | JOMBANG: SUTONO | PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO: IMAN SANTOSO | BONDOWOSO-SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO | MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 031-87854491 | PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | TELP IKLAN 031-87854491 | NIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Revolusi Denim: Lebih dari Sekadar Tampilan Kasual

Eksistensi denim sebagai juara di lemari perempuan Indonesia memang tak tergoyahkan. Namun di tahun 2026, mix and match denim tampil beda, tidak lagi sekedar jeans dan kaos.

Berdasarkan tren gaya hidup terkini, kini hadir gaya yang lebih berani bertajuk The Sculptural Denim. Tren ini menonjolkan potongan denim yang kaku dan berdimensi, mengubah

citra bahan kelas pekerja ini menjadi lebih modis.

Musim ini, tren denim-on-denim dengan gradasi kontras tengah berada di puncaknya. Jika biasanya kita diminta bermain aman dengan warna senada, tren kali ini justru mengajak Anda bereksperimen dengan menabrakkan dark indigo dan acid wash.

Paduan ini menciptakan kedalaman visual yang unik dan menghapus kesan kaku. Inovasi ini sangat pas bagi mereka yang ingin menjaga penampilan tetap profesional, tapi tetap ingin menyisipkan karakter berani dan ekspresif.

Pada aspek padu padan selanjutnya, kunci untuk tampil memukau terletak pada pemilihan aksesori yang kontras dengan karakter denim yang kaku.

Memadukan oversized denim jacket dengan rok satin atau gaun transparan menciptakan keseimbangan antara sisi maskulin dan feminin. Lebih jauh lagi, penggunaan korset denim yang melapisi kemeja putih poplin kini menjadi standar baru bagi busana kantor yang casual namun tetap berwibawa.

Poin utama yang membedakan ulasan ini adalah penekanan pada Sustainable Denim Styling. Di tengah meningkatnya kesadaran lingkungan, tren 2026 lebih mengapresiasi teknik patchwork yang dirancang secara artistik.

Denim lama yang telah melalui proses upcycling justru memiliki nilai prestise lebih tinggi daripada produk

baru, sebab setiap tambalannya menyimpan narasi personal sang pemilik.

Rahasia Gaya Denim Anti-Gagal

Biar OOTD kamu tetap fresh, stylish, dan nggak kelihatan membosankan, yuk intip panduan praktis yang bisa langsung kamu cek dan aplikasikan keberbagai gaya harian berikut ini:

Mainkan Tekstur

Beranikan diri buat tabrak tekstur! Padukan distressed denim (jeans robek) dengan atasan berbahan tweed atau sutra. Kontras antara tekstur kasar dan halus bakal bikin look kamu kelihatan "mahal" secara instan tanpa harus ribet layering.

Aksesoris Metalik

Karena karakter denim itu netral dan santai, kasih sentuhan glamor lewat perhiasan emas atau perak yang ukurannya agak besar (chunky jewelry). Trik simpel ini bikin outfit berbahan jeans terlihat lebih bold dan berkelas.

Eksperimen Alas Kaki

Simpan dulu sneakers kamu. Coba pasangkan celana wide-leg andalan dengan pointed heels atau boots transparan yang lagi hype di 2026. Trik ini ampuh buat kasih ilusi kaki yang lebih jenjang dan ramping, sekaligus bikin

tampilan lebih statement.

Ikat Pinggang yang Mencolok

Gunakan ikat pinggang dengan buckle (kepala sabuk) yang unik atau besar. Selain jadi pusat perhatian, detail kecil ini jadi rahasia biar siluet tubuhmu nggak "tenggelam" dalam denim dan tetap terlihat proporsional serta on point. (Nathasya, Mahasiswa Uinsa Berkontribusi dalam tulisan ini)



Aksesoris Metalik



Eksperimen Alas Khaki



Ikat Pinggang Buckle



Sejarah Perkembangan Denim

● Asal-usul (Abad ke-17 & 18)

Kota Nîmes, Prancis mencoba meniru kain wol Italia, namun justru menciptakan kain katun twill yang kuat, sering disebut serge de Nimes (asal nama denim). Warna biru ikonik berasal dari pewarna indigo yang digunakan pada masa itu.

● Kelahiran Jeans (1873)

Levi Strauss dan Jacob Davis mematenkan penggunaan rivet (paku keling) pada celana denim untuk memperkuat titik tekanan bagi pekerja tambang dan buruh di Amerika Serikat.

● Pakaian Kerja ke Pop Culture (1950-an)

Denim beralih fungsi dari pakaian kerja menjadi simbol pemberontakan anak muda, dipopulerkan oleh aktor seperti James Dean.

● Evolusi (1960-an - Sekarang)

Menjadi pakaian kasual umum, simbol gerakan hippie, hingga tren fashion tinggi (high fashion). (*)

KPK Menanti Klarifikasi ...dari hal 1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu klarifikasi Menteri Agama (Menag) atas penggunaan jet pribadi milik pengusaha dan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, dalam kunjungan ke Sulawesi Selatan pada pertengahan Februari. Lembaga antirasuah menyatakan proses penelaahan awal masih berlangsung dan menempatkan penjelasan langsung pejabat terkait sebagai pintu masuk verifikasi fakta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto, dalam keterangan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2/2025), mengatakan lembaganya mengedepankan mekanisme klarifikasi sukarela sebelum menempuh langkah formal.

"Syukur-syukur kalau kemudian sudah merespons, bisa mempertanggungjawabkan tanpa harus diundang dan tanpa harus dipanggil," kata Setyo, 18 Februari 2026.

Ia menegaskan, setiap dugaan penerimaan fasilitas oleh pejabat negara harus dinilai berdasarkan konteks pemberian, hubungan dengan jabatan, dan potensi konflik kepentingan.

"Kami tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa itu salah. Semua melalui proses kajian," ujarnya.

Polemik bermula dari perjalanan Menteri Agama Nasaruddin Umar ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 15 Februari 2026, untuk menghadiri peresmian Balai Sarkiah. Dokumentasi yang beredar menunjukkan rombongan menteri berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma menggunakan jet pribadi yang disebut milik OSO. Pesawat mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, lalu rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Takalar.

Menurut penjelasan tertulis Kementerian Agama, 17 Februari 2026, fasilitas transportasi tersebut disediakan oleh pihak pengundang demi menyesuaikan agenda menteri yang padat dan tidak menggunakan anggaran negara.

"Pak OSO secara khusus mengundang dan berharap Balai Sarkiah diresmikan Menag. Pak OSO juga yang berinisiatif menyiapkan jet pribadi agar beliau dapat hadir di tengah agenda yang padat," demikian keterangan Kementerian Agama.

Dalam rangkaian kegiatan di Takalar, Menteri Agama menghadiri peresmian fasilitas layanan keagamaan, berdialog dengan tokoh masyarakat, serta meninjau program pembinaan umat. Agenda berlangsung dalam waktu terbatas sebelum rombongan kembali ke Jakarta pada hari yang sama.

Penggunaan fasilitas non-negara oleh pejabat publik kerap berada pada wilayah abu-abu antara kemudahan operasional dan potensi gratifikasi. KPK menilai konteks pemberian menjadi penentu, apakah fasilitas tersebut terkait langsung dengan jabatan atau kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Setyo Budiyanto mengatakan penelaahan dilakukan melalui pengumpulan informasi dari sumber terbuka, termasuk dokumentasi perjalanan, pernyataan resmi, dan pemberitaan media.

"Kami melihat konteksnya, apakah berkaitan dengan jabatan dan apakah ada potensi konflik kepentingan. Itu yang sedang kami dalami," kata Setyo, 18 Februari 2026.



Ruang Server Masjid Istiqlal Kebakaran Saat Salat Tarawih

KEBAKARAN sempat terjadi di ruang server Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, (18/2/2026), saat salat tarawih masih berlangsung. Api diduga bersumber dari perangkat UPS (Uninterruptible Power Supply) yang berada di bawah panel listrik di ruangan tersebut.

Petugas Pemadam Kebakaran Unit Pos Istiqlal, Muhammad Ramdan, menjelaskan laporan awal diterima dari pihak keamanan sekitar pukul 20.40 WIB. Ketika tim tiba di lokasi, ruangan sudah dipenuhi asap tebal dan masih terlihat satutik api di bagian bawah panel listrik. Api kemudian dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan.

Menurut Ramdan, kobaran api tidak besar, tetapi kepulan asap yang pekat membuat petugas tidak dapat langsung masuk tanpa perlengkapan pernapasan. Petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap serta self contained breathing apparatus (SCBA) untuk menangani kebakaran.

Proses pemadaman berlangsung

ia menambahkan, pejabat negara memiliki kewajiban melaporkan penerimaan fasilitas yang berhubungan dengan jabatan kepada otoritas yang berwenang untuk dinilai status hukumnya. Penilaian tersebut menjadi dasar apakah fasilitas termasuk gratifikasi yang harus ditolak, dilaporkan, atau dinyatakan tidak bermasalah.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan langsung dari Menteri Agama mengenai rencana memberikan klarifikasi kepada KPK. Lembaga antirasuah menyatakan belum menjadwalkan pemanggilan resmi dan masih menunggu respons sukarela.

Diketahui, Nasaruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal

terjadi penurunan tegangan. Tim investigasi masih mendalam faktor teknis yang memicu insiden tersebut.

Sementara itu dalam tausiahnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya semangat "Ramadhan Hijau" yang mengedepankan sifat feminin—kelembutan dan kepedulian—saat menyampaikan ceramah pada salat Tarawih perdana Ramadhan 1447 H di Masjid Istiqlal, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa Allah lebih diperkenalkan sebagai "God" yang bernuansa feminin ketimbang "Lord" yang berkonotasi maskulin, menegaskan sifat Ilahi yang Maha Lembut. Karena itu, umat diajak menumbuhkan karakter religius yang ramah terhadap lingkungan—bersikap "hijau", menenangkan diri, melembutkan hati, serta menjauh dari kemarahan.

Ia mengajak umat menjadikan Ramadhan sebagai momentum untuk menata diri: menenangkan batin, menjernihkan pikiran, dan membangun relasi yang harmonis dengan alam semesta.

Sebagai Imam Besar Istiqlal, ia juga memaparkan rangkaian kegiatan selama Ramadhan di masjid tersebut. Selain Tarawih yang diawali lantunan qari internasional, akan digelar kultum dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, tokoh publik, hingga dai ternama. Agenda lain mencakup peringatan Nuzulul Quran yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara serta takbiran bersama masjid-masjid besar di kawasan ibu kota regional. (qid,ant/dya)

IMF USUL PAJAK KARYAWAN RI DINAIKKAN, PURBAYA 'OGAH'

Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2/2026). Keputusan itu diambil setelah sidang isbat yang digelar Kementerian Agama di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (17/2/2026). Berbeda dengan itu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada Rabu (18/2/2026). Perbedaan memang sering terjadi mengingat metode penetapannya memang tak sama.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menanggapi kajian IMF yang mensimulasikan kenaikan bertahap PPh Pasal 21 sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi publik sekaligus upaya mempertahankan defisit fiskal di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, pemerintah memiliki tidak menaikkan tarif pajak sebelum kondisi ekonomi benar-benar kuat. Fokus kebijakan saat ini adalah memperluas basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan negara. Namun, ia mengakui kenaikan pajak tetap menjadi opsi jika kebutuhan fiskal tidak terpenuhi.

Purbaya menjelaskan strategi fiskal pemerintah masih memanfaatkan ruang defisit untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui stimulus. Pendekatan tersebut, kata dia, terbukti mampu membalikkan arah ekonomi tanpa melampaui batas defisit 3 persen.

Ke depan, arah kebijakan fiskal



akan disesuaikan dengan dinamika ekonomi dan stabilitas sosial. Pemerintah, menurut Purbaya, ingin memastikan kebijakan ekonomi tidak memicu gejolak sosial seperti demonstrasi besar yang pernah terjadi sebelumnya.

Sebelumnya, IMF dalam kajian fiskal jangka panjang menilai Indonesia berpotensi meningkatkan investasi publik secara bertahap

sekitar 0,25 hingga 1 persen PDB dalam dua dekade mendatang. Untuk mendukung pembangunan menuju target Visi Emas 2045, lembaga itu menampilkan skenario ilustratif berupa peningkatan pajak penghasilan tenaga kerja sambil menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen PDB.

Sepanjang 2025, defisit anggaran

ACUAN PAJAK KARYAWAN RI DARI KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:

Lapisan tarif PPh 21:

- 5% → sampai Rp 60 juta
- 15% → di atas Rp 60 juta - Rp 250 juta
- 25% → di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta
- 30% → di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar
- 35% → di atas Rp 5 miliar

Yang dikenai tarif itu penghasilan kena pajak (PKP), yaitu penghasilan bruto dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

PTKP per tahun (umum dipakai):

- TK/0 (lajang) → Rp 54 juta
- Tambahan kawin → + Rp 4,5 juta
- Tambahan per tanggungan (maks. 3 orang) → + Rp 4,5 juta/orang



Utang Luar Negeri RI Naik Lagi, Diklaim Masih Aman

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang pemerintah Indonesia masih berada dalam batas aman meski nominalnya meningkat. Hingga 31 Desember 2025, total utang tercatat Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta. Purbaya menilai rasio utang Indonesia relatif terkendali jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan.

"Dengan standar itu, kita masih aman. Strategi kita memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Kita tidak melewati 3 persen, tetapi tetap memberi stimulus," katanya.

Rasio utang Malaysia berada di kisaran 64 persen terhadap PDB pada 2025, Thailand sekitar 63,5 persen, sementara Singapura jauh lebih tinggi di kisaran 165 hingga 170 persen PDB. Dengan perbandingan tersebut, pemerintah menilai posisi fiskal

Indonesia masih berada pada level yang aman dan terukur.

Pemerintah, lanjut Purbaya, secara konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB. Sepanjang 2025, defisit APBN tercatat Rp695,1 triliun atau sekitar 2,92 persen terhadap PDB. Ruang defisit yang tersedia sengaja dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui ekspansi fiskal dan stimulus yang terukur.

Menurutnya, strategi tersebut dirancang untuk memastikan perekonomian berbalik arah tanpa melampaui batas kehati-hatian fiskal. Pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menghindari kebijakan tergesa-gesa yang berisiko menekan daya beli masyarakat atau menghambat proses pemulihan ekonomi.

Di sisi lain, data menunjukkan utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2025 mencapai sekitar 431,7 miliar dolar AS, meningkat

dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 427,6 miliar dolar AS. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan utang luar negeri sektor publik, khususnya pemerintah, sementara utang luar negeri swasta justru mengalami penurunan.

Utang luar negeri pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sekitar 214,3 miliar dolar AS, naik dari 210,1 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi aliran masuk modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional di tengah tetap terjadinya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia meskipun ketidakpastian pasar keuangan global meningkat.

Pemanfaatan utang pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen dari total utang luar negeri pemerintah, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 19,8 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,7 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,6 persen. (wid,ktn,ist/dya)

Indonesia tercatat mendekati batas tersebut, yakni sekitar 2,92 persen terhadap PDB. IMF menekankan bahwa pemilhan pajak penghasilan sebagai sumber tambahan penerimaan hanya bersifat ilustratif dalam simulasi kebijakan fiskal jangka panjang.

International Monetary Fund mensimulasikan kenaikan bertahap Pajak Penghasilan karyawan (PPh 21) sebagai salah satu opsi pembiayaan untuk memperkuat investasi publik di Indonesia.

Gagasan tersebut tercantum dalam kajian fiskal jangka panjang yang menyoroti kebutuhan pendanaan pembangunan guna mencapai target Visi Emas 2045, sekaligus menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Sepanjang 2025, defisit Indonesia tercatat mendekati batas tersebut, yakni sekitar 2,92 persen terhadap PDB.

IMF memproyeksikan Indonesia berpeluang meningkatkan investasi publik secara bertahap dalam kisaran 0,25 persen hingga 1 persen PDB selama sekitar dua dekade ke depan. (wid,rla,ktn/dya)